

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana yang dilaporkan Harian Pagi Timor Express edisi 31 Agustus 2013, akhirnya menelan korban jiwa. Dalam *Headline* artikel beritanya yang berjudul *Pilbup SBD Makan Korban*, Harian Pagi Timor Express melaporkan peristiwa ini disebabkan oleh bentrokan yang terjadi antar pendukung pasangan calon.

Bentrokan warga yang berujung maut, kemarin pecah di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Bentrokan terjadi antar pendukung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati di Kabupaten SBD, yang menyebabkan dua korban jiwa.

Begitupun dengan Surat Kabar Harian Pos Kupang dalam *Headline* artikel beritanya edisi 1 September 2013, menggambarkan suasana Kota Weetabula di Kabupaten Sumba Barat Daya mencekam. Mengambil judul *Weetabula Mencekam*, SKH Pos Kupang melaporkan bahwa telah terjadi saling serang diantara dua kelompok warga yang menyebabkan tiga orang tewas.

Suasana tegang dan mencekam karena pengendara roda dua hilir mudik di wilayah kota sambil memegang panah dan tombak pertanda mau perang. Situasi di jalan raya di Weetabula sepih.

Peristiwa yang tergambar dalam pemberitaan Harian Pagi Timor Express dan SKH Pos Kupang ini sebagai dampak dari ditolakny

gugatan pasangan calon KONco OLE ATE oleh Mahkamah Konstitusi 29 Agustus 2013 silam. Pemberitaan dua media massa lokal ini sekaligus menjadi cerminan bagaimana peran media sebagai pilar keempat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini

Pelaksanaan pesta demokrasi apa pun bentuknya mulai dari pemilihan presiden, gubernur, walikota hingga bupati, senantiasa akan mendapat tempat di media massa. Dalam konteks lokal, keterkaitan pers dan dunia politik, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi satu fenomena yang tak terpisahkan. Sejak masa Orde Lama hingga runtuhnya rezim Orde Baru, pilkada seperti gubernur, bupati maupun walikota hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hingga memasuki masa reformasi, tepatnya pada tahun 2004 ketika disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pemilihan langsung oleh rakyat resmi diberlakukan. Dalam hal ini, wacana media menjadi satu arena pertarungan untuk memperoleh kekuasaan. Menurut Bourdieu, sebagaimana yang diuraikan Dosi (2012: 80) dalam bukunya *Media Massa Dalam Jaringan Kekuasaan*, bahwa yang dimaksudkan dengan wacana sebagai arena (*field*) adalah dalam wacana itu terjadi pertarungan atau perjuangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau kelas sosial yang berbeda untuk mempertegas dan memperlihatkan pengaruh serta kekuatannya.

Konflik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri merupakan konflik yang masih tergolong baru di Indonesia. Adapun pasangan calon yang

ikut bertarung memperebutkan “kursi panas” dalam pilkada SBD 2013 ini yakni, pasangan Markus Dairo Tallu-Dara Tanggu Kaho (MDT-DT), Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto (KONco OLE ATE) dan Jacob Malo Bulu-John Milla Mesa Geli (Manis). Pada akhirnya, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU SBD pada Sabtu, 10 Agustus 2013, pasangan MDT-DT tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perolehan Suara Tiga Paket

Paket	Suara	Persentase
MDT-DT	81.543	47,62 persen
KONco OLE ATE	79.498	46,43 persen
Manis	10.179	5,94 persen

Sumber: SKH Pos Kupang edisi Minggu 11 Agustus 2013

Berdasarkan pemberitaan SKH Pos Kupang edisi 11 Agustus 2013 hingga 16 September 2013, diketahui bahwa perolehan suara inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik. Diawali gugatan pasangan KONco OLE ATE terhadap KPU SBD ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pasangan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Gugatan ini dipicu sejumlah fakta di lapangan akan adanya penggelembungan suara di beberapa wilayah di SBD. Konflik ini semakin memanas, ketika sidang MK yang digelar pada 29 Agustus 2013 memutuskan menolak permohonan KONco OLE ATE dan tetap mensahkan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Dampaknya, terhitung pada 30 Agustus 2013 konflik berdarah pun pecah di tanah Marapu (kepercayaan yang memuja nenek

moyang dan leluhur) SBD. Berdasarkan data yang dilansir sejumlah media lokal, 38 unit rumah dibakar, seorang lainnya dibunuh karena kalah judi, rumah Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) II Kabupaten SBD dilempar dan dipanah, serta perang suku yang telah menewaskan enam orang tak dapat dihindarkan. Konflik ini terus berlanjut setelah penyidikan tindak pidana kepolisian pada 12 Agustus 2013 yang berujung pada dibukanya kembali kotak suara, menemukan adanya penggelembungan 13.712 suara yang berakibat pada ditetapkannya 18 tersangka oleh polisi. Dengan demikian, hasil *real* pilkada SBD ternyata dimenangkan oleh pasangan KONco OLE ATE.

Namun perlu diingat bahwa keputusan MK bersifat mutlak dan mengikat, belum ada perangkat hukum yang memungkinkan untuk diadakan revisi dan peninjauan ulang terhadap keputusan MK. Polemik inilah yang pada akhirnya mendorong sejumlah kalangan meminta MK membuat terobosan hukum baru, karena konflik pilkada yang terjadi di Sumba Barat Daya ini membuktikan kelalaian MK dalam memutuskan sengketa pikada tanpa memeriksa 144 kotak suara yang dibawa pemohon pasangan KONco OLE ATE.

Suhu politik pasca pilkada SBD yang kian memanas ini tentu tidak hanya diributkan oleh para elit partai dan massa pendukung saja. Keberadaan pers lokal pun turut andil dalam memaknai peristiwa hingga pada mencetuskan resolusi konflik. Beragam *statement* politik pihak yang pro dan kontra dari kedua pasangan bupati turut menyeruak ke ruang publik, mengisi ruang-ruang kosong disetiap kolom media massa menggambarkan kecenderungan politik dari dua

media lokal terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni Surat Kabar Harian (SKH) Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express. Di era industri media saat ini, baik SKH Pos Kupang maupun Harian Pagi Timor Express turut terarah dalam konglemerasi media. Dalam bukunya *Media Massa Dalam Jaring Kekuasaan*, Dosi (2012: 150) menyatakan saat ini SKH Pos Kupang dimodali oleh pengusaha lokal dan berada dalam lingkungan group Kompas Gramedia. Sementara Harian Pagi Timor Express dimodali oleh pengusaha dan elit politik lokal serta berada pada lingkungan *Jawa Pos Group*. Dalam wacana yang dibangun oleh kedua media ini terdapat korelasi isi media dan kepentingan ideologi dari orang atau sumber daya yang memodali perusahaan. Menurut Dosi (2012: 188), karakteristik menonjol yang terjadi adalah media massa cetak lokal NTT yakni SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express tidak hanya merefleksikan ideologi kelompok pemilik media yaitu kelompok Kompas dan Jawa Pos, namun juga turut merefleksikan ideologi kelompok pengiklan, partai politik seperti Golkar, PDI-P, juga pemberi dana seperti gereja dan pemerintah.

Perbedaan ideologi dengan kelompok yang berkepentingan dalam kedua media ini, tentunya berakibat pada pemaknaan realitas yang berbeda sehingga mempengaruhi proses produksi teks berita. Hal inilah yang mendasari peneliti memilih SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express, dimana dalam setiap pemberitaannya terdapat sejumlah perbedaan pengemasan dan *frame* yang ditunjukkan keduanya. Dalam konteks peliputan konflik pasca pilkada Sumba

Barat Daya, baik Pos Kupang maupun Timor Express mengemas berita dengan beberapa cara, seperti meletakkannya di judul berita (*heading*), pada foto, keterangan foto, atau pada kalimat-kalimat pembuka berita (*leads*). Teknik ini dilakukan untuk membantu pembaca mengenali dengan cepat misi yang dikehendaki oleh kedua media ini dalam pemberitaannya.

Pembingkaiannya realitas inilah yang oleh Hackett (dalam Eriyanto, 2005: 59) menjadikan media sebagai arena perang simbolik oleh para elit yang berkepentingan. Dimana masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak. Media dilihat sebagai forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam konteks inilah mereka menggunakan bahasa simbol atau retorika dengan konotasi tertentu yang umumnya bermuara pada membenarkan tindakan sendiri dan memburukkan pihak lain. Kutipan *Headline* berita SKH Pos Kupang edisi Rabu, 02 Oktober 2013 menjadi gambaran yang jelas bagaimana dua media ini menjadi arena perang retorika para elit yang berkepentingan dalam konflik pasca pilkada SBD.

“Tiga hari yang lalu, KPU menyerahkan kepada DPRD lalu DPRD dengan kewenangannya meneruskan kepada Mendagri melalui gubernur. Yang diserahkan adalah hasil pleno KPU Sumba kedua, tanggal 26 September. Itu yang masuk dalam registrasi DPRD SBD karena secara kelembagaan ini yang kami tahu. Yang pertama (pleno KPU SBD tanggal 10 Agustus 2013, **Red**) tidak ada secara administrasi,” ujar Malo Lende, diamini anggota DPRD SBD lainnya (berita utama *Headline* Pos Kupang, ‘*DPRD SBD Hanya Akui Pleno Ulang*’).

Pernyataan Ketua DPRD SBD terkait berkas pengusulan pasangan calon bupati terpilih MDT-DT yang tak terdaftar secara administrasi ini pun lalu secara tegas dibantah oleh pihak KPU NTT yang diwakili oleh Djidon de Haan sebagai juru bicara KPU NTT

“Coba Tanya KPUD SBD, gubernur sudah terima dan dikembalikan (pengusulan paket MDT-DT) karena ada kekurangan yang dibawa pimpinan DPRD. Lalu dibilang tak teregister, aneh,” kata Djidon (berita pendukung *Headline* Pos Kupang, ‘*Aneh Tak Teregister*’).

Masih pada edisi yang sama, SKH Pos Kupang turut menampilkan artikel berita pertentangan pihak KPU NTT dan KPUD SBD dalam hal penyelenggaraan rapat pleno ulang

“Bagaimana mungkin kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kita tidak boleh membiarkan atau mewariskan hal yang salah di SBD. KPUD SBD punya tanggung jawab moral untuk meluruskan hal yang salah sehingga warga memahami. Kita harus mengajarkan hal yang benar kepada rakyat. Bukan sebaliknya. Mestinya KPU NTT dan Banwaslu memahami sikap kami ini,” ujar Marianus anggota KPUD SBD (berita pendukung *Headline* Pos Kupang, ‘*Tak Mau Mewarisi Hal Salah*’).

Petarungan retorika para elit yang berkepentingan ini ketika disajikan oleh media massa menunjukkan pers lokal dalam peranannya sebagai pengawas kepentingan publik. Oleh Artha (2009: hal.3), sebagai institusi komunikasi massa, pers memegang peranan strategis untuk menciptakan kondisi sosial dan kultural pelaksanaan pilkada yang objektif, netral dan independen. Dengan kata lain, demokratisasi dan pembelajaran politik oleh pers dapat berjalan dan bertumbuh jika pers dapat menyediakan ruang bebas (*public sphere*) yang netral. Bagi Pasaribu (dalam Artha, 2009: hal.3), apabila ada pihak yang

mengklaim realitas politik yang disampaikannya sebuah kebenaran, sedangkan realitas itu berkaitan dengan kepentingan publik, maka pers dapat menyajikan informasi yang didukung fakta empiris yang diperoleh dari sumber lain (*cover both side*) sebagai wacana perlawanan. Upaya ini membuat pers menjalankan fungsinya sebagai pengawas demi kepentingan publik (*public-watch dog*). Namun menjadi pertanyaan adalah netralitas media dalam pilkada mungkinkah? Media akan selalu terjebak (dijebak) pada keberpihakan. Ambil contoh jika media memberitakan kasus negatif seorang calon gubernur maka berita ini secara sadar maupun tidak, jelas akan menguntungkan calon gubernur yang lainnya. Berita yang ditulis seorang jurnalis akan selalu “tidak menguntungkan” atau “menguntungkan” bagi kelompok politik tertentu. Sehingga secara praktik media, netralitas sulit diwujudkan.

Netralitas pers lokal dalam pilkada tentunya tak lepas dari bagaimana setiap media memaknai dan mendefenisikan realitas yang ada. Alhasil peristiwa yang sama dapat ditampilkan secara berbeda, tergantung dari bagaimana media membingkai peristiwa itu. Ambil contoh kirsruh pilkada Sumba Barat Daya terkait pelantikan pasangan calon MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Sumba Barat Daya, yang berujung tarik ulur kepentingan para elit dalam pemberitaan SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express. Harian Pagi Timor Express dalam artikel beritanya edisi Jumat, 27 September 2013 menampilkan realitas bahwa berkas pengajuan pelantikan MDT-DT sudah lengkap dibuat oleh DPRD SBD dan diantar langsung ke gubernur oleh wakil ketua DPRD SBD.

“Waktu itu hanya perbaikan pada tanggal suratnya, sehingga kita langsung buat perbaikan. Jadi semua berkas sudah lengkap tinggal Gubernur proses lebih lanjut. Saya yang antar langsung usulan waktu itu,” tegas Yusuf saat dikonfirmasi via telepon tadi malam (*Headline* Harian Pagi Timor Express, ‘*Gubernur Kembalikan Usulan Pelantikan MDT-DT*’).

Peristiwa ini rupanya ditampilkan secara berbeda oleh SKH Pos Kupang pada artikel beritanya edisi 02 Oktober 2013, yang memuat kutipan ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lande, yang justru mengatakan DPRD SBD tidak mengetahui hasil pleno KPUD SBD yang menetapkan paket MDT-DT sebagai pemenang pilkada karena tidak pernah tercatat secara administrasi di lembaga ini. Maka, DPRD SBD hanya mengakui hasil pleno ulang KPUD SBD yang menetapkan paket KONco OLE ATE sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

“Tiga hari yang lalu, KPU menyerahkan kepada DPRD lalu DPRD dengan kewenangannya meneruskan kepada Mendagri melalui gubernur. Yang diserahkan adalah hasil pleno KPU Sumba kedua, tanggal 26 September. Itu yang masuk dalam registrasi DPRD SBD karena secara kelembagaan ini yang kami tahu. Yang pertama (pleno KPU SBD tanggal 10 Agustus 2013, **Red**) tidak ada secara administrasi,” ujar Malo Lende, diamini anggota DPRD SBD lainnya (berita utama *Headline* Pos Kupang, ‘*DPRD SBD Hanya Akui Pleno Ulang*’).

Dua kutipan artikel berita SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express ini menggambarkan bagaimana suatu peristiwa yang sama (pengajuan berkas pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih SBD MDT-DT) dengan narasumber yang mewakili institusi yang sama (DPRD SBD), dapat ditampilkan dan didefinisikan secara berbeda oleh dua media lokal ini.

Perbedaan SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express dalam mengkonstruksi realitas inilah yang disebut Nugroho (1999: viii) sebagai arena sosial atau panggung publik, dimana berbagai kelompok

berusaha menampilkan defenisi situasi serta defenisi realitas sosial menurut mereka sendiri, dan dalam arena itu berbagai isu serta figur yang terkait didalamnya, didefenisikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan masing-masing bertarung untuk menjadikan versinya sebagai yang paling sah. Dalam model arena sosial tersebut pers tak bisa dilihat sebagai saluran yang netral, pasif, sekedar kumpulan medium yang melaporkan realitas sosial. Bagi Nugoroho (1999: ix), di tengah ideologi media yang dominan maka usaha untuk mendefenisikan suatu realitas sosial tentunya tidak dilakukan secara eksplisit dan vulgar. Lihat saja pemberitaan media terhadap Habibie terkait konflik Timor-Timur pada tahun 1999. Usaha untuk mendefenisikan Habibie sebagai *the bad guy* atau *the good guy* tidak selalu dilakukan secara eksplisit dan vulgar, melainkan melalui penyajian yang mengesankan objektivitas, keseimbangan dan sikap non-partisipan, namun *toh* bisa menggiring khalayak untuk melihat dan mendefenisikan suatu realitas dalam bingkai tertentu, dalam sudut pandang tertentu dengan struktur simbol-simbol bahasa tertentu atau bahkan menggunakan sistem logika tertentu pula.

Upaya SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express untuk mendefenisikan realitas sosial seperti inilah yang akan mampu diungkap melalui analisis framing, sebuah metode analisis teks media yang mencoba menangkap bentuk pemberitaan yang memperlihatkan orientasi sebuah media dengan cara tertentu memperlakukan fakta. Pada analisis framing ada instrumen metodologis yang dipakai untuk melihat cara media mengkonstruksi sebuah wacana berita, dengan melakukan penonjolan-penonjolan tertentu.

framing is an individual psychological process, but it is also an organizational process and product and a political strategic tool. Framing processes occur at four levels: in the culture, in the minds of elites and professional political communicators, in the texts of communications, and in the minds of individual citizens. These frames function to promote an interpretation of a problematic situation or actor and (implicit or explicit) support of a desirable response, often along with a moral judgment that provides an emotional charge (Entman dalam The Handbook of Journalism Studies, 2009: 176).

framing adalah proses psikologis individu, tetapi juga merupakan proses organisasi dan produk serta alat politik yang strategis. Proses *framing* terjadi pada empat tingkatan: dalam budaya, dalam pikiran elit atau komunikator politik profesional, dalam teks komunikasi, dan di benak warga negara. *Frame* ini berfungsi untuk mendorong interpretasi dari situasi bermasalah atau aktor dan (implisit atau eksplisit) mendukung respon yang diinginkan, dengan pertimbangan moral yang memberikan muatan emosional (Entman dalam *The Handbook of Journalism Studies*, 2009: 176).

Bagi Robert M. Entman, framing tidak hanya melibatkan sisi individual wartawan namun merupakan produk dari proses organisasi dan sebagai alat politik yang strategis. Untuk itu, framing berfungsi sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi, dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan.

Adapun analisis framing yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman dikarenakan dapat menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Dalam model ini, framing dipandang sebagai

penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi yang lebih besar daripada isu yang lain. Dengan kata lain, pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu menurut Eriyanto (2005: 186) pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan. Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan defenisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Melihat peristiwa pilkada di Sumba Barat Daya (SBD) yang berujung pada konflik dan menuai kontroversi di kalangan masyarakat NTT khususnya SBD, maka menjadi penting untuk menakar sejauh mana pendefinisian realitas oleh media sebagai pilar keempat bagi masyarakat. Kecenderungan politik seperti SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express yang notabene menjadi patron informasi bagi sebagian besar masyarakat NTT, kemudian menjadi substansial untuk ditelaah lebih jauh. Bagaimana sebenarnya kedua media ini memainkan peran kekuasaan politik dalam praktik wacananya, menjadikan *frame* pemberitaan konflik pilkada SBD merupakan kekuasaan yang tercetak. Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, hingga pada siapa yang menindas dan siapa yang tertindas.

Dalam hal ini, *frame* menunjukkan identitas para aktor atau *interest* yang berkompetisi untuk mendominasi teks.

Sementara itu, periode pemberitaan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah pasca pencoblosan pilkada Sumba Barat Daya yakni 11 Agustus 2013 hingga pada rapat pleno ulang penetapan rekapitulasi perolehan suara pilkada Sumba Barat Daya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTT dan kontroversi penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar yang diklaim sebagai biang konflik pilkada Sumba Barat Daya pada 05 Oktober 2013.

Pemilihan obyek penelitian ini oleh peneliti didasarkan pada pemicu konflik pasca pilkada yang disebabkan dugaan pihak KONco OLE ATE telah terjadi penggelembungan suara. Hal ini didasarkan pada berita SKH Pos Kupang edisi 11 Agustus 2013 dimana pihak KONco OLE ATE menolak hasil rekapitulasi KPUD SBD.

Saksi paket KONco OLE ATE kembali menegaskan menolak hasil rekapitulasi dan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih karena terjadi penggelembungan suara MDT-DT. KONco OLE ATE juga meminta aparat keamanan mengamankan semua data hasil perolehan suara (berita *Headline* pendukung Pos Kupang, 'Markus-Dara Jawara SBD').

Adapun Harian Pagi Timor Express edisi 30 Agustus 2013, menyatakan dalam *Headline* artikel beritanya, pemicu konflik pasca pilkada SBD ini dipicu oleh gugatan pihak KONco OLE ATE yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh permohonan gugatan paket calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya nomor urut 2, Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Motto. Dalam sidang dengan agenda membacakan putusan perkara tersebut, Kamis (29/8), MK menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, dan memerintahkan termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan amar

keputusan tersebut (berita *Headline* Harian Pagi Timor Express, 'MK Tolak Gugatan KONCO').

Hingga pada akhirnya konflik ini berujung pada dibukanya kembali kotak suara dan terbukti adanya penggelembungan suara. Penetapan pasangan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPUD SBD pun dipertanyakan keabsahannya. Peristiwa ini pada akhirnya membuat KPUD SBD melakukan pleno ulang yang memenangkan paket KONCO OLE ATE. Pada beritanya edisi 02 Oktober 2013, Harian Pagi Timor Express justru menampilkan berita tentang pihak KPU NTT yang diwakili oleh juru bicaranya, Djidon de Haan menolak mengakui pleno ulang yang dilakukan oleh KPUD SBD.

Namun, ia menjelaskan, pleno yang dilakukan KPU SBD adalah berdasarkan perhitungan ulang oleh kepolisian. Sedangkan polisi telah menegaskan, kalau penghitungan ulang itu hanya untuk membuktikan kasus pidana, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan hasil Pemilu. "Jadi sesungguhnya pleno KPU SBD itu tidak berdasar, tegas Djidon (berita *Headline* Harian Pagi Timor Express, 'Menangkan Konco, Kalahkan MK Dulu').

Konflik pasca pilkada ini semakin menarik ketika Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan oleh Pos Kupang Akil dinyatakan sebagai biang kerusuhan pilkada di Sumba Barat Daya pada terbitan edisi 05 Oktober 2013.

Agustinus menganggap Akil Mochtar sebagai biang kerusuhan di SBD karena ketua majelis hakim yang mengadili sengketa hasil pemilu SBD sangat tidak bersikap adil. "Keputusannya yang dibuat sangat melukai hati rakyat SBD yang jelas-jelas memilih paket KONCO OLE ATE tapi dia membalikan fakta. Yang membuat kami tidak terima, kenapa kotak suara tidak dibuka MK, padahal yang minta kotak suara dibawa itu MK. Ada apa ini? Dengan ditangkapnya Akil Mochtar terkait suap, menguatkan kecurigaan warga SBD bahwa putusan sengketa pemilu SBD juga diwarnai kecurangan. Diwarnai suap menyuap," kata

Agustinus (Pos Kupang, 'Menari Ronggeng Rayakan Penangkapan Akil').

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk meneliti *frame* SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express dalam membingkai pemberitaan terkait konflik pilkada SBD dengan judul **“BEREBUT MAKNA ALA MEDIA (Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Timor Express)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express membingkai konflik pasca pemilihan umum kepala daerah Sumba Barat Daya?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat peran pers lokal sebagai aktor strategis dalam pesta demokrasi, dimana pers merupakan pelaku mediasi yang menjadi agen pembentuk opini bahkan pemihakan pada salah satu kepentingan politik yang berkompetisi. Sebagai institusi yang bertugas menyampaikan informasi dan mendidik kesadaran politik masyarakat, netralitas mediasi pers lokal memang menjadi masalah pelik. Di satu sisi, pers

lokal dituntut untuk bersikap netral atas pemberitaannya mengenai isu-isu pilkada langsung. Di sisi lain, pers lokal juga dituntut untuk senantiasa bersikap kritis dan transparan terhadap segala bentuk penyimpangan yang mungkin berlangsung selama masa kampanye dan pasca pemilihan.

Begitupun ketika pilkada berbuntut konflik, pers lokal sejatinya menjadi agen penting dalam mencanangkan resolusi konflik. Resolusi konflik sendiri menurut Weitzman & Weitzman (dalam Rahmanty 2012: 17) adalah sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Sementara bagi Mindes (dalam Rahmanty 2012: 17) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Dengan demikian, menurut Armando dkk (2011: 08) media diharapkan bukan sekedar mewartakan peristiwa, apalagi memprovokasi, namun mengambil pilihan yang mendorong masyarakat untuk mengambil respon non-kekerasan terhadap konflik. Media mengupayakan perdamaian dengan membangun sikap kolektif khalayak dan masyarakat luas untuk mendorong tercapainya resolusi konflik. Media memobilisasi khalayak untuk bersama-sama terlibat dalam upaya meredam kemarahan masing-masing pihak (Armando dkk, 2012: 09).

Peliknya netralitas pers dalam pilkada juga diungkapkan Iwan Awaluddin Yusuf dalam penelitiannya dengan judul *Media Lokal*

dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah pada Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Volume 14, 2011: 298)

Netralitas media lokal dalam pemilihan kepala daerah misalnya, atau eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi dan politis daripada aspek informatif dan edukatif bagi publik adalah dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi peran media. Alih-alih menjadi lembaga keempat (*fourth estate*) yang mengawal proses demokratisasi (di ranah lokal), justru media lokal dicurigai berubah fungsi menjadi kepanjangan tangan “raja-raja” daerah yang menyokong nasionalisme kesukuan dan primordialisme lokal.

Adapun keunikan penelitian ini dibanding penelitian sejenis adalah dari sisi perspektif teoritis, peneliti menguraikan relevansi media dalam pilkada sebagai hasil dari demokrasi yang prosedural, serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemilihan langsung kepala daerah sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pada sejumlah pemberitaan media massa. Sementara dari sisi subjek penelitian, peneliti ingin melihat bagaimana ideologi Kompas dan Jawa Pos serta faktor kelompok dominan hingga ideologi kesukuan yang masih kental di masyarakat NTT, mempengaruhi pemberitaan SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express terhadap konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini mengingat faktor sosiologis dan antropologis dapat membentuk suatu media lokal menjadi identitas masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagai dampak dari peran media lokal dalam menampilkan berbagai budaya, termaksud bagaimana SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express menampilkan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya dalam setiap

pemberitaannya terkait konflik pasca pilkada yang di gelar 05 Agustus 2013 silam.

Topik penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yakni konflik pasca pilkada Sumba Barat Daya (SBD) yang tergolong baru dalam sejumlah kisruh pilkada yang pernah terjadi di Indonesia. Pilkada SBD berujung pada dilakukannya pleno ulang rekapitulasi perhitungan surat suara karena diduga terjadi penggelembungan suara. Peristiwa ini menjadi kontroversi karena belum ada ketentuan hukum yang mengatur diadakannya pleno ulang dan peninjauan kembali keputusan MK yang bersifat final dan mengikat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express membingkai pemberitaan Konflik Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumba Barat Daya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan terkait media dan berita yang dilihat dari paradigma konstruksionis.
- b. Memperoleh pengetahuan tentang konsep framing dan hubungannya dengan proses produksi berita.

- c. Memperoleh pengetahuan tentang strategi politik media yang digunakan dalam membingkai realitas sosial, khususnya isu politik.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik dengan penelitian analisis teks media khususnya yang menggunakan metode analisis framing.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait adanya *frame* dalam media massa.
- c. Dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi jurnalis serta institusi media massa SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express dalam menulis dan melaporkan peristiwa kepada khalayak.

1.5.3 Manfaat Sosial

Memberikan sebuah wahana pemahaman kepada masyarakat umum berkenaan dengan pemberitaan media massa terkait konflik pasca pilkada SBD.